

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Akhmad Budi Cahyono and Surini Ahlan Syarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- B.F. Sihombing. *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Chatamarrasjid Ais. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Damanhuri HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- D.H.M. Meuwissen. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan: Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Edy Putra Tje Aman. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Frans Magnis Suseno. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co., 2005.
- H. Halim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Johannes Ibrahim. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Johannes Ibrahim Kosasih. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Komar Andasasmita. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Leonora Bakarbesy and Ghansham Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan: Moetarid Sadino. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moch Isnaeni. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.
- Mulyoto. *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
- Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Niewenhuis J.H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan: Djasadin Saragih. Surabaya: Airlangga University Press, 1985.
- Nurul Qamar. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Veithal Rivai and Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi, Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Veithal Rivai and Rifki Ismal. *Islamic Risk Management for Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Jurnal Internasional/Jurnal Nasional

- Fence M. Wantu. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007).
- Juliana Evawati. "Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang." *Yuridika* 29, no. 2 (2014).

- Lis Sintha. "Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Industri Perbankan." *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 1 (2016).
- M. Mutharom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014).
- Tengku Erwin Syahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).

Hasil Penelitian

- Djuwita Devi Nalurita. "Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta." Tesis, Universitas Airlangga, 2010.
- Faisal Abdillah Hernawan. "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi Pada Kantor Pencatatan Perkawinan." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Gayatri Galuh Pertiwi. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Dokumen Palsu Dalam Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." Tesis, Universitas Airlangga, 2020.
- Simon. "Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang." Tesis, Universitas Diponegoro, 2011.
- Sry Wulandari. "Asas Publiciteit (Publisitas) Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pengikatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Lembaga Perbankan." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3316).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791).

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 540/Pdt/2015/PT.Bdg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pdt/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt/2021.

Website/Internet

Reza Boentoro. “Penerapan Pasal 1872 KUHPdata Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-1872-kuhperdata-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-lt58d8f593a6541/>, diakses pada 15 Mei 2025.

Willa Wahyuni. “Melihat Aktivitas PPAT Dan Notaris Saat Libur Lebaran,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-aktivitas-ppat-dan-notaris-saat-libur-lebaran-lt626c2968d6ee2/?page=all>, diakses pada 15 Mei 2025.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Garut, secara daring melalui Google Meet, tanggal 9 Mei 2025, pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat.

Hasil wawancara dengan Faqih Zuhri, Ketua Sub-Kelompok Perkawinan dan Perceraian Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jl. Letjen S. Parman Nomor 7, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 9 Mei 2025, pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat.

